

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi Amerika Serikat muncul di tahun 1980-an yang dipromosikan oleh Ronald Reagan, presiden Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu. Selama menjabat, Reagan menerapkan prinsip neoliberalisme karena menganggap pasar bebas dan kapitalisme dapat meningkatkan kondisi perekonomian negara. Neoliberalisme sendiri merupakan suatu perspektif yang mendukung adanya pasar bebas dan menolak campur tangan pemerintah yang menyebabkan hambatan perdagangan internasional dan investasi dengan tujuan meningkatkan standar hidup masyarakat sebuah negara (Holborow, 2015). Dengan demikian, negara beserta perusahaan multinasional (MNC) berperan penting dalam membentuk sebuah tatanan ekonomi politik global. Keberadaan MNC sendiri berperan dalam menciptakan kekayaan dan mengalokasikan sumber daya antar negara dalam ekonomi global yang kemudian turut mempengaruhi politik internasional (Cohen, 2007). Perkembangan hubungan internasional yang dinamis menjadikan MNC sebagai salah satu aktor non-negara yang memiliki peran penting karena *foreign direct investment* (FDI) yang dilakukan perusahaan multinasional secara umum menjadi indikator terhadap baik buruknya perekonomian suatu negara yang kemudian mempengaruhi kedudukan negara tersebut di mata internasional (Mursitama, 2013).

Dalam rangka mendorong globalisasi ekonomi, Reagan melakukan deregulasi dengan mengurangi pajak individu dari 70% menjadi 28% sedangkan tarif perusahaan yang semula 48% diturunkan menjadi 34% untuk mendorong adanya investasi (Fessler, 1981). Kebijakan yang

diterapkan Reagan ini memungkinkan banyak perusahaan Amerika untuk melakukan outsourcing pekerjaan manufaktur dan jasa dari Amerika Serikat ke negara berbiaya rendah seperti negara berkembang atau negara dunia ketiga. Penghematan finansial dari tingkat tenaga kerja yang lebih rendah ini menjadi faktor utama bagi perusahaan untuk melakukan outsourcing. Beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa kebijakan Reagan menghasilkan ekspansi ekonomi yang tenang dengan masa terpanjang ketiga dalam sejarah Amerika dan menjadi salah satu periode kemakmuran terpanjang dan terkuat dalam sejarah Amerika dengan peningkatan pendapatan pajak dari 517 miliar USD menjadi 909 miliar USD di tahun 1988, inflasi berkurang menjadi 4% dari semula 13.5% dan tingkat pengangguran turun menjadi 5,5% dengan 20 juta lapangan pekerjaan tercipta. Melalui deregulasi pasar domestik, privatisasi, dan penghapusan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh Amerika membuka peluang bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang sehingga menjadi unit paling produktif dengan pengaruh finansial, ekonomi, dan politik yang besar (STWR, 2006). Periode ini menjadi awal mula meluasnya ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika melalui perusahaan-perusahaan multinasionalnya (Jackson, U.S Direct Investment Abroad: Trends and Current Issues, 2006). Jumlah investasi perusahaan Amerika ke luar negeri semakin meningkat setiap tahunnya setelah adanya globalisasi ekonomi (Jackson, U.S. Direct Investment Abroad: Trends and Current Issues, 2017).

Kesuksesan globalisasi ekonomi Amerika Serikat dalam membawa perusahaan ke dalam pasar global ternyata menimbulkan perdebatan. Menurut A.Michael Spence, globalisasi merugikan beberapa sub kelompok di beberapa negara termasuk negara maju, kesenjangan pendapatan semakin meningkat dan lapangan pekerjaan telah banyak berkurang. Perusahaan bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja yang cukup terampil dalam rangka memenuhi

permintaan pasar. Tenaga kerja dengan pendidikan tinggi mendapatkan lebih banyak peluang sedangkan peluang bagi tenaga kerja berpendidikan rendah semakin menurun ditambah dengan pendapatan yang stagnan. Hal ini diperparah dengan perusahaan-perusahaan besar penyedia lapangan pekerjaan yang justru memilih untuk memindahkan produksi ke negara lain (Freeland, 2011).

Dampak dari perkembangan teknologi dan globalisasi ini kemudian menjadi fokus presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin membawa kembali lapangan pekerjaan dan mengembangkan kebijakan perdagangan yang menuntut perusahaan Amerika menciptakan pekerjaan di dalam negeri bukan di luar negeri. Dengan mengusung nasionalisme ekonomi, Trump berusaha melindungi kekuatan AS dari segala ancaman dari negara lain baik dari sisi sosial, politik, dan ekonomi dengan membuat kebijakan-kebijakan protektif terkait perdagangan internasional yang melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika. Trump berjanji untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan dalam 10 bulan, sebagian dengan menyiapkan kredit pajak untuk perusahaan Amerika yang bersedia merelokasikan kembali fasilitas manufaktur dari Cina ke Amerika Serikat. Pemerintahannya juga akan mencabut kontrak federal dari perusahaan yang mengalihdayakan pekerjaan ke Cina (Allyn, 2020).

Adanya kebijakan ini tentu saja memunculkan kebingungan bagi perusahaan Amerika yang melakukan sebagian besar produksinya di luar negeri, salah satunya yaitu Apple Inc, sebagai salah satu perusahaan kebanggaan Amerika dengan label "*Assembled in China*" Keunggulan Cina dalam sektor manufaktur membuat Apple sebagai perusahaan teknologi harus bergantung kepada Cina. Selama dua dekade terakhir Cina telah menjadi basis produksi dibalik kesuksesan Apple secara global. Sangat sedikit negara yang memiliki infrastruktur serupa dengan Cina yang mampu memproduksi 600.000 telepon sehari untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu

operasional pabrik memerlukan tenaga kerja yang kompeten dalam memecahkan masalah terkait perancangan dan proses perakitan (Pino, 2018).

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana respon Apple Inc. terhadap kebijakan nasionalisme ekonomi Amerika Serikat?”

C. Teori

Untuk memahami permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan kerangka teori dan konsep berikut:

1. Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi merupakan bentuk pembaruan dari merkantilisme atau sering disebut dengan neo merkantilisme yang memiliki gagasan untuk mengembalikan pandangan akan negara yang kuat dengan menggunakan neraca perdagangan sebagai tolok ukur kesuksesannya. Secara historis, istilah nasionalisme ekonomi sering digunakan untuk merujuk pada kritik perdagangan dan kebijakan ekonomi liberal. Konsep ini kemudian disempurnakan oleh para ahli sebagai ideologi yang berkomitmen untuk menjadikan ekonomi melayani tujuan nasionalis (Helleiner, 2019).

Nasionalisme ekonomi merupakan suatu pandangan yang mendukung adanya campur tangan negara terhadap mekanisme pasar melalui pembuatan kebijakan (Gilpin, 2001). Para nasionalis lebih menekankan pada industrialisasi di mana negara turut membantu industri dalam negeri karena menganggap bahwa industri merupakan suatu aspek penting yang mempengaruhi perekonomian seperti meningkatkan swasembada dan otonomi politik negara serta aspek penting dalam membangun kekuatan militer (Shulman, 2000). Pemikiran nasionalis ekonomi neomerkantilis awalnya muncul sebagai reaksi terhadap perdagangan bebas yang dianggap dapat

merusak kekayaan dan kekuasaan negara, sebagai respon politik terhadap krisis keuangan yang merupakan dampak dari globalisasi, besarnya skala krisis keuangan tentu saja menjadi ancaman politik bagi negara, serta reaksi politik terhadap perkembangan kapitalisme yang tidak merata dan sebagai gagasan sentral bahwa kegiatan ekonomi harus tunduk pada tujuan pembangunan dan kepentingan negara (Amadeo K. , 2021). Para nasionalis ekonomi kemudian mengembangkan pertahanan intelektual baru sebagai proteksionisme perdagangan dan jenis aktivisme ekonomi pemerintah lainnya sebagai alat untuk mempromosikan kekuatan dan kekayaan negara (Helleiner, 2019).

Pemikiran nasionalisme ekonomi didasari ide yang menyatakan bahwa ekonomi harus diletakkan pada pelayanan pembentukan suatu negara yang kuat dan mendukung kepentingan nasional yang memungkinkan kekayaan diatur dan dikendalikan negara (Robert Jackson, 2013). Meskipun cenderung menentang globalisasi, paradigma ini tidak menolak keberadaan pasar, tetapi juga tidak membiarkan kekayaan suatu negara hanya ditentukan oleh pasar dunia saja. Para nasionalis ekonomi berusaha untuk melindungi kepentingan negara khususnya kedudukan politik dan militer melalui pembentukan cara kerja pasar nasional dan internasional. Hal ini diperlukan untuk menyelaraskan pasar dengan tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, negara berusaha untuk mengendalikan komando tertinggi dalam ekonomi melalui perusahaan yang sepenuhnya milik negara atau yang bertindak sebagai agen negara. Negara mengusahakan kepentingan perusahaan dapat sejalan dengan kebijakan resmi. kebijakan tersebut dapat berupa kontrol domestik terhadap ekonomi yaitu pengendalian impor untuk menciptakan monopoli domestik, pembiayaan untuk menetapkan mata uang tenaga kerja, modal untuk mengarahkan investasi ke sektor prioritas dan nasionalisasi untuk mendirikan perusahaan milik negara serta peneanan tarif dan pembatasan lainnya jika diperlukan (Marrison, 2017).

Tatanan internasional yang anarkis mendorong negara menuju persaingan dan memaksimalkan kekuatan relatif untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, dengan demikian posisi negara dalam sistem internasional semakin kuat melalui penyusunan kebijakan ekonomi dalam memaksimalkan kekayaan negara. Melalui pembuatan kebijakan, negara mencoba untuk mengontrol hasil pasar yang dapat membatasi perkembangan perusahaan-perusahaan berpengaruh dan untuk mendapatkan akses istimewa terhadap bahan mentah dan pasar yang penting. Singkatnya, nasionalis ekonomi mengasumsikan bahwa negara berusaha untuk mengontrol investasi asing dan aliran keuangan lainnya yang membatasi kerentanan terhadap kendala ekonomi eksternal. Nasionalisme ekonomi dianggap sebagai praktik yang dirancang untuk menciptakan, mendukung dan melindungi ekonomi nasional dalam konteks pasar dunia (Pryke, 2012).

Nasionalisme ekonomi atau neo merkantilisme saat ini terbagi menjadi defensif dan ofensif yang kemudian memunculkan perbedaan penting mengenai perilaku dan aktivitas ekonomi negara yang didorong kebijakan ekonomi nasional seperti pengelolaan nilai tukar dan pengendalian arus lintas batas investasi atau manusia. Neomerkantilis ofensif lebih cenderung pada kebijakan ekonomi luar negeri yang dirancang untuk mempromosikan ekspor dan mendukung perusahaan nasional di luar negeri, sedangkan neomerkantilis defensif lebih fokus ke dalam untuk memperkuat pasar domestik namun tetap terbuka terhadap perdagangan internasional (Helleiner, 2019).

Table. 1.1 Perbedaan neo-mercantilis defensif dan ofensif

Goals	Power	Defensive vs offensive
	Wealth	Aggregate vs wider social concerns
	Geographical vision	national vs wider focus
Means	Strategic trade protectionism	Limited vs extensive
	Other activist foreign economic policies	Exchange rates, investment, migration, export promotion, supporting national firms abroad
	Domestic economic activism	Limited vs extensive
	Style of politics	Populist vs. elitist

Sumber : (Helleiner, 2019)

Berdasarkan penjabaran di atas, pemerintahan Trump tergolong ke dalam nasionalisme ekonomi atau neomerkantilis yang ofensif di mana kebijakan Amerika Serikat telah berubah tajam ke arah proteksionis dan menentang norma-norma utama dalam perdagangan internasional pasca perang. Pemerintahan Trump berfokus pada bagaimana proteksionisme strategis dapat meningkatkan kekayaan dan kekuasaan negara serta memprioritaskan manufaktur, memperkuat kemerdekaan dan keamanan nasional, kebutuhan untuk menghadapi praktik neomerkantilis asing, dan keinginan untuk memiliki ekonomi domestik yang lebih produktif dan beragam. Namun pada praktiknya, hal ini tidak diimbangi dengan aktivisme ekonomi pemerintah domestik yang ekstensif sebagai strategi untuk memperkuat kekayaan dan kekuasaan Amerika. Nasionalisme ekonomi Trump lebih melibatkan proyeksi aktif kekuasaan di luar negeri untuk mendukung kepentingan Amerika Serikat (Helleiner, 2019).

2. Konsep Perusahaan Multinasional

Perusahaan Multinasional atau MNC merupakan perusahaan yang mengendalikan fasilitas produksi atau aset di banyak negara dalam satu waktu dan memperolehnya melalui proses penanaman modal asing secara langsung, umumnya memiliki kantor atau pabrik di berbagai

negara dengan kantor pusat yang mengkoordinasikan manajemen global (D. Chandler Jr & Mazlish, 2005). MNC dapat dimiliki secara pribadi atau secara publik oleh pemerintah, memiliki berbagai macam bentuk dan keunikan tersendiri. MNC merupakan entitas yang kompleks dan beragam sehingga cukup dikenal dengan keambiguitasannya sebagai entitas tanpa kewarganegaraan dan tanpa kesetiaan pada negara atau gaya bisnis tertentu (Cohen, 2007).

MNC pada era modern adalah kekuatan ekonomi, politik, lingkungan dan budaya yang tidak bisa dihindari di dunia global dan memiliki dampak terhadap kehidupan miliaran orang secara kompleks dan tidak terlihat (D. Chandler Jr & Mazlish, 2005). Keberadaan MNC sendiri berperan dalam menciptakan kekayaan dan mengalokasikan sumber daya antar negara dalam ekonomi global yang kemudian turut mempengaruhi politik internasional (Cohen, 2007). Perkembangan hubungan internasional yang dinamis menjadikan MNC sebagai salah satu aktor non-negara yang memiliki peran penting karena *foreign direct investment* (FDI) yang dilakukan perusahaan multinasional secara umum menjadi indikator terhadap baik buruknya perekonomian suatu negara yang kemudian mempengaruhi kedudukan negara tersebut di mata internasional (Mursitama, 2013).

Terkait aktivitas MNC, meskipun tidak mengancam otoritas negara, tetapi MNC memiliki pengaruh kuat dalam hal kedaulatan, yaitu kedaulatan secara global, aliran barang, mata uang, bahkan hak asasi manusia dan faktor luas seperti pergerakan migrasi global yang berada diluar kendali negara berdaulat sehingga arus tersebut tidak mementingkan batas negara (D. Chandler Jr & Mazlish, 2005). Meningkatnya skala perdagangan komoditas dan lintas batas layanan, aliran modal, dan penyebaran teknologi yang meluas dengan cepat memungkinkan adanya ekspansi berkelanjutan bagi perusahaan-perusahaan multinasional karena memperbesar akses pasar bagi

produk dalam negeri menuju pasar global begitupun dengan peluang masuknya produk asing ke dalam pasar domestik. (Shangquan, 2000)

Perusahaan multinasional secara global berperan mengatur produksi dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prinsip maksimalisasi keuntungan. Setidaknya seperempat dari pendapatan MNC berasal dari luar negara asalnya. Offshoring yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menciptakan lapangan pekerjaan dan akses barang di berbagai negara. Hal ini dikritik karena dianggap memiliki pengaruh politik yang tidak semestinya terhadap pemerintah, mengeksploitasi negara berkembang dan menghilangkan lapangan pekerjaan di negara asalnya. Faktor yang mempengaruhi keputusan MNC untuk mengalokasikan investasi dan mendirikan anak perusahaan di luar negeri meliputi empat hal. Faktor pertama yaitu terkait sumber daya yang meliputi kualitas infrastruktur, transportasi, aksesibilitas bahan baku, dan sejauh mana pejabat politik mengakomodasikan perusahaan asing dengan membelikan tata kelola yang baik, pajak yang menguntungkan dan kebijakan peraturan, serta aturan hukum. Kedua, untuk melindungi atau memperluas pasar asing. Adanya potensi pengurangan waktu dan biaya transportasi terkait pengiriman barang menjadi pilihan yang sangat menguntungkan bagi perusahaan dengan produk besar atau berat. Selain itu, keberadaan anak perusahaan di negara tuan rumah juga memungkinkan perusahaan untuk memodifikasi dan mengakomodasi selera konsumen lokal. Faktor ketiga yaitu sebagai upaya untuk mengurangi biaya produksi. Faktor terakhir yaitu untuk memperoleh beberapa atau semua aset perusahaan asing sebagai upaya meningkatkan daya saing korporasi (Cohen, 2007). Kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi mempermudah ruang gerak perusahaan untuk memindahkan manufakturnya. pasar yang lebih besar, infrastruktur yang lebih canggih, dasar keterampilan dan tingkat pendidikan

yang lebih baik serta perkembangan lokal yang dinamis menarik perusahaan untuk melakukan outsourcing secara global.

Kondisi negara yang kondusif mengurangi hambatan formal dan informal untuk perusahaan melakukan investasi dan penanaman modal asing secara langsung (FDI). Perusahaan tidak perlu menjual produk di pasar lokal sebagai bentuk investasi langsung, namun perusahaan dapat mendirikan fasilitas manufaktur di negara-negara berbiaya rendah tetapi mengekspor ke pasar lain. Keragaman FDI membuat perusahaan dapat melakukan ekspansi dengan lebih mudah, salah satunya yaitu FDI Brownfield yang memungkinkan perusahaan dapat membeli atau menyewa fasilitas produksi yang ada sehingga aktivitas produksi dapat dilaksanakan lebih cepat (Chang, 2006).

Berdasarkan penjabaran di atas, konsep perusahaan multinasional sangat berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, di mana konsep ini menjelaskan secara rinci terkait hal-hal yang perlu diperhatikan perusahaan multinasional, termasuk Apple, dalam memilih lokasi produksi dan menetapkan manufaktur serta melaksanakan kegiatan outsourcing.

D. Hipotesa

Berdasarkan dari penjabaran permasalahan di atas dan kerangka pemikiran sebagai alat analisa permasalahan tersebut, jawaban sementara yang diambil penulis sebagai berikut :

Perusahaan Apple merespon kebijakan nasionalisme ekonomi Amerika Serikat dengan tidak mengembalikan manufakturnya ke Amerika Serikat melainkan membelikan dana repatriasi untuk investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

- A. Jenis Penelitian : Penelitian yang ditulis bersifat Kualitatif atau Eksplanatif. Penulis akan membelikan gambaran secara eksplanatif terkait permasalahan yang dibahas.
- B. Jenis Data : Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, surat kabar maupun sumber-sumber daring pendukung lainnya yang menyangkut tentang permasalahan yang dibahas.
- C. Teknik Analisis : Menjelaskan permasalahan secara jelas dan teratur serta sistematis dengan menggunakan konsep, teori dan pandangan dari para ahli sebagai sumber menganalisis. Sedangkan kasus berperan sebagai pengaplikasian teori, konsep dan pandangan yang di dapat dalam data-data yang telah dikumpulkan

F. Tujuan Penelitian

1. Memahami kebijakan nasionalisme ekonomi Amerika Serikat
2. Mengetahui respon Apple Inc. sebagai perusahaan multinasional terhadap kebijakan nasionalisme ekonomi Amerika Serikat
3. Membuktikan hipotesa dalam penelitian

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, jangkauan penelitian sangat penting untuk diperhatikan mengingat pentingnya batasan yang harus dipahami dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Peneliti dibatasi oleh kondisi politik dan ekonomi yang terjadi dan mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri adanya kemungkinan penulis yang mengaitkan hal-hal diluar batasan-batasan yang ada untuk memperjelas penelitian sehingga penjelasan bisa lebih sistematis dan komprehensif.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian ini akan ditulis dalam tiga bab, yang terdiri dari :

a. Bab 1 : Pendahuluan

membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

b. Bab 2 : Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang :

1. Perkembangan Apple Inc. melalui adanya globalisasi ekonomi
2. Kebijakan nasionalisme ekonomi Amerika Serikat
3. Respon Apple Inc. terhadap kebijakan ekonomi Amerika Serikat

c. Bab 3 : Kesimpulan.

Berisi kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, terutama dalam merangkum analisis yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan penulis

